



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROGRAM STUDI **MAGISTER** ILMU ADMINISTRASI **PUBLIK**



Alamat:

Jalan Mayjen Haryono No. 163 Malang-65145
Telp FIA (0341) 553737, 558226
Fax FIA (0341) 558227
Website: fia.ub.ac.id/s2publik
Contact person: Rahmi Amalia (08581522284)

Program Studi **MAGISTER** ILMU ADMINISTRASI **PUBLIK**

PENDAHULUAN

Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas unggul dalam lingkungan yang dinamis dan sarat dengan perubahan baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Program Magister Ilmu Administrasi Publik sejak tahun 1996, merupakan aset yang sangat berharga didukung oleh staff akademik yang mumpuni, program pendidikan yang didesain secara cermat, kurikulum yang selalu dirancang ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta dukungan fasilitas akademik dan non akademik yang memadai, merupakan keunggulan dari program ini.

VISI

Menjadi lembaga yang tetap mengutamakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terkemuka serta terus berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi institusi yang terkemuka secara Internasional di tahun 2015.

MISI

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan bertaraf Nasional dan Internasional untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan profesional sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dalam kerangka governance yang baik dan bermanfaat.
- 2) Mengembangkan penelitian dibidang administrasi publik serta menyebarluaskan dan mendayagunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut secara global untuk pendewasaan budaya masyarakat dan kemaslahatan umat.
- 3) Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kebaikan umat manusia dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

PERSYARATAN CALON

Persyaratan calon peserta yang diterima pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik/ Negara :

1. Sarjana Ilmu Administrasi Publik/ Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Komunikasi, Sosiologi dan Sarjana di luar bidang tersebut.
2. Memiliki IPK minimal 2,75 (pada skala 1-4) atau 6,25 (pada skala 0-10).
3. Memiliki sertifikat TPA dan TOEFL.
4. Kewajiban menempuh Matakuliah Prasyarat (MMP) ditentukan berdasarkan hasil tes wawancara.



PERSYARATAN PENDAFTARAN

Peminat mengajukan permohonan tertulis sebagai mahasiswa kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi UB Malang

Permohonan dilampiri dengan (rangkap 3) :

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Salinan ijazah yang telah dilegalisir
3. Salinan daftar nilai selama di perguruan tinggi yang telah dilegalisir
4. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang dianggap dapat memberikan penilaian kelayakan akademik
5. Karya ilmiah setelah lulus sarjana (bila ada)
6. Surat ijin belajar dari atasan, jika pelamar telah bekerja
7. Surat keterangan tentang sumber dana
8. Daftar riwayat hidup
9. Surat keterangan kesehatan
10. Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
11. Salinan sertifikat TOEFL (Laboratorium Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Administrasi / Laboratorium Bahasa Universitas Brawijaya / Universitas Negeri Malang) dan TPA (bisa ditempuh diberbagai tempat termasuk penyelenggaraan rutin di FIA UB)

SELEKSI DAN KEPUTUSAN PENERIMAAN

Semua calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan administratif wajib mengikuti tes wawancara dengan membawa Ijazah asli dan Daftar Nilai/ Transkrip Nilai S1 asli.. Keputusan penerimaan akan dilakukan melalui rapat pimpinan dan Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik/ Negara. Hasil keputusan dapat dilihat pada papan pengumuman dan / atau disampaikan kepada calon mahasiswa sesuai dengan alamat yang tertulis dalam pendaftaran, sebagai berikut :

1. Diterima tanpa syarat
2. Diterima dengan syarat
3. Ditolak

Keterangan :

~ *) Pembayaran dilakukan setelah ada pengumuman hasil seleksi dan disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan Akademik

~ Semua bukti pembayaran di foto copy 3 lembar dan 1 lembar asli diserahkan pada Bagian Pendaftaran Program MIA FIA – UB

~ Biaya Lain-Lain : Ordik, Perpustakaan, Layanan IT dan Jaket Almamater

PROGRAM MENEMPUH MATAKULIAH PRASYARAT (MMP)

Bagi calon yang dinyatakan "diterima dengan syarat" maka diwajibkan Menempuh Matakuliah Prasyarat (MMP), melakukan :

1. Pembayaran MMP.
2. Daftar ulang MMP dengan menyerahkan bukti pembayaran MMP (di foto copy sebanyak 3 lembar) dan 1 lembar asli ke Bagian Pendaftaran Program MIA FIA-UB.



DAFTAR ULANG SEMESTER 1

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan Registrasi secara online
3. Bukti Registrasi Mahasiswa Baru , Surat Pernyataan Mahasiswa dan Biodata Mahasiswa Baru Program Magister S2 di cetak sebanyak 3 rangkap.
4. Mengisi Form Kartu Rencana Studi.
5. Membawa foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar.
6. Menyerahkan semua bukti pembayaran

BEBAN DAN LAMA STUDI

Beban studi untuk Program Magister Ilmu Administrasi Publik/ Negara, ditetapkan sebesar 39 sks. Lama studi Program Magister Ilmu Administrasi Publik/ Negara, dirancang untuk kurun waktu antara 3 semester (1,5 tahun) sampai dengan maksimal 8 semester (4 tahun).

KURIKULUM

Kurikulum disusun meliputi Menempuh Matakuliah Prasyarat (MMP), Matakuliah Wajib Program dan matakuliah Wajib Minat dan matakuliah Pilihan. Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 semester dan 1 semester berlangsung 18 minggu, dimulai pada bulan September dan bulan Februari.

TEMPAT PENDAFTARAN

Program Studi Magister Administrasi Publik
Jalan Mayjen Haryono No.163 Malang 65145

Contact person:
Rahmi Amalia (08581522284)

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik/ Negara :**Menempuh Matakuliah Prasyarat (MMP)**

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1		Pengantar Ilmu Administrasi Publik	2	MMP
2		Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah	2	MMP

Matakuliah Wajib Program

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6121	Filsafat & Teori Ilmu Administrasi Publik	3	I
2	IAP6122	Etika & Akuntabilitas Publik	3	I
3	IAP6123	Perubahan & Budaya Organisasi	3	I
4	IAP6124	Metodologi Penelitian	3	I

Matakuliah Wajib Minat Kebijakan Publik

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6201	Analisis Kebijakan Publik	3	II
2	IAP6202	Evaluasi Kebijakan Publik	3	II
3	IAP6203	Formulasi Kebijakan Publik	3	II
4	IAP6204	Implementasi Kebijakan Publik	3	II

Matakuliah Wajib Minat Manajemen Publik

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6205	Manajemen Pelayanan Publik	3	II
2	IAP6207	Reformasi Administrasi Publik	3	II
3	IAP6220	Manajemen Strategi Sektor Publik	3	II
4	IAP6223	Kepemerintahan & Kemitraan	3	II

Matakuliah Wajib Minat Administrasi Pemerintahan Daerah

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6116	Manajemen Sumberdaya Aparatur	3	II
2	IAP6126	Seminar Pemerintahan Daerah	3	II
3	IAP6217	Teori Desentralisasi	3	II
4	IAP6222	Pemerintahan Lokal	3	II

Matakuliah Wajib Minat Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6210	Perencanaan Pembangunan Daerah	3	II
2	IAP6228	Teori Pembangunan	3	II
3	IAP6256	Perencanaan Strategis	3	II
4	IAP6257	Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah	3	II

Matakuliah Wajib Minat Administrasi Keuangan Daerah

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6111	Manajemen Proyek	3	II
2	IAP6114	Manajemen Audit	3	II
3	IAP6211	Akuntansi Publik	3	II
4	IAP6260	Seminar Keuangan Daerah	3	II

Matakuliah Pilihan

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	IAP6113	Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah	3	II
2	IAP6125	Seminar Kebijakan Publik	3	II
3	IAP6127	Seminar Manajemen Publik	3	II
4	IAP6212	Ekonomi Politik Pembangunan	3	II
5	IAP6221	Manajemen Pengukuran Kinerja	3	II
6	IAP6258	Evaluasi & Monitoring Pembangunan Daerah	3	II
7	MDG6106	Seminar on Governance	3	II

Matakuliah Wajib Program

No	Kode	Matakuliah	sks	Smt
1	UBU6007	Tesis	9	III/IV

STAF PENGAJAR INTI

1	Abdul Juli Andi Gani	Prof., Dr., MS
2	Abdul Hakim	Prof., Dr., M.Si
3	Abdullah Said	Dr., M.Si
4	Agus Suryono	Prof., Dr., MS
5	Andy Fefta Wijaya	Ph.D., MDA
6	Bambang Santoso Haryono	Dr, MS
7	Bambang Supriyono	Prof. Dr., MS
8	Choirul Saleh	Dr., MS
9	Endah Setyowati	Dr., S.Sos., M.Si
10	Fadilah Amin	Drs., MAP., Ph.D
11	Hermawan	Dr., S.IP., M.Si
12	Imam Hanafi	Dr., M.Si., MS
13	Irwan Noor	Dr., MA
14	Lely Indah Mindarti	Dr., M.Si
15	Luqman Hakim	Dr., M.Sc.
16	M. Saleh Soeaidy	Dr., MA
17	M.R. Khairul Muluk	Dr., S.Sos., M.Si
18	Mardiyono	Dr., MPA
19	Mochamad Makmur	Dr., MS
20	Ratih Nur Pratiwi	Dr., M.Si

STAF PENGAJAR INTI

21	Riyanto	Dr., M.Hum
22	Romy Hermawan	Dr., Rel.Pol., S.Sos., MAP
23	Sarwono	Dr., M.Si
24	Siti Rochmah	Dr., M.Si
25	Sjamsiar Sjamsudin	Prof., Dr
26	Soesilo Zauhar	Prof., Dr., MS
27	Sujarwoto	S.IP., M.Si., Ph.D
28	Sumartono	Prof., Dr., MS
29	Suryadi	Dr., MS
30	Tjahjanulin Domai	Dr., MS
31	ZA. Achmady	Prof., Drs., MPA

STAF PENGAJAR INTI**PENGAJAR DARI KALANGAN PRAKTIKSI:**

1.	Ginandjar Kartasasmita (DPD RI)	Prof. Dr.
2.	Fadel Muhammad (Menteri Kelautan)	Dr.
3.	Dedy Bratakusumah (Staf Ahli Menpan)	Dr., MURP

FASILITAS

1. Dosen Lulusan Perguruan Tinggi dari dalam dan luar negeri yang kompeten di bidangnya.
2. Tenaga administrasi yang siap memberikan pelayanan.
3. Ruang kuliah yang nyaman dan memadai.
4. Tempat parkir kendaraan yang teratur rapi.
5. Lingkungan kampus UB yang asri, sejuk, pohon rindang dan bersih.
6. Perpustakaan dengan koleksi yang memadai dan mutakhir, ruang baca, dll.
7. Fasilitas jaringan WAN / LAN dan internet.
8. Fasilitas kantor Bank di lingkungan kampus.
9. Mushola, masjid dan fasilitas olah raga.
10. Beasiswa BPPS bagi dosen PTN/ PTS

PERSYARATAN PENDAFTARAN BPPS

1. Permohonan untuk memperoleh BPPS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus mendapat persetujuan dan diajukan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal calon penerima BPPS kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Bagi calon penerima BPPS yang berasal dari PTS, persetujuan dan usulan calon penerima BPPS harus memperoleh rekomendasi dari pihak Kopertis Wilayah (Formulir B).
2. Usia maksimum yang diperbolehkan untuk menjadi calon penerima BPPS adalah 55 tahun pada bulan September tahun diajukan.
3. Calon penerima BPPS hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PPS.
4. Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima BPPS pada jenjang pendidikan Pascasarjana yang sama.
5. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian & biaya pengelolaan) dari sumber dana Pemerintah RI.
6. Beasiswa diberikan kepada calon penerima BPPS yang berstatus Mahasiswa Baru, untuk jangka waktu 24 bulan untuk Program Magister (S2). Mahasiswa On going dengan jangka waktu sisa masa studi (sesuai strata/jenjang pendidikan yang ditempuh).
7. Calon penerima BPPS harus telah memenuhi syarat akademik dan administrasi (termasuk persyaratan TPA dan TOEFL) untuk diterima sebagai mahasiswa Program Studi S2 di Universitas Brawijaya (dilampiri dengan surat penerimaan sebagai mahasiswa program studi ybs).
8. Penerima BPPS wajib menandatangani kontrak antara yang bersangkutan dengan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
9. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPPS diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke Perguruan Tinggi asal selama (2n+1) tahun (n adalah lama tahun menerima BPPS).
10. Penerima BPPS diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dan melaporkan tanggal serta bulan kelulusan pada bulan yang sama dengan tanggal kelulusan, kepada PPSUB, dengan mengisi form monitoring & evaluasi (MONEV) dwi wulan.
11. Penerima BPPS tidak diperkenankan untuk cuti akademik dalam menyelesaikan Program Studinya selama beasiswa belum selesai/habis.
12. Penerima BPPS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dikenakan sanksi, yaitu mengembalikan dana BPPS sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.